



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78715
Laman bkpsdm.kapuashulukab.go.id. Pos-el bkpsdm@kapuashulukab.go.id

**LAPORAN REFOCUSING PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Berikut adalah data refocusing program dan kegiatan terhadap perubahan nomenklatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu yang berdampak pada perubahan anggaran dan penyesuaian kegiatan untuk tahun 2023:

NO	Nomenklatur Lama	NO	Nomenklatur Baru
1.	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	1.	Bidang Mutasi dan Promosi
2.	Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	2.	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Data Kinerja ASN
3.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

I. Bidang Mutasi dan Promosi
Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN

🚩 **Anggaran: Sebelumnya Rp 1.123.747.000,- -> Refocusing menjadi Rp 1.149.747.000,-**

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan struktur organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu, terjadi pengkonsolidasian dan pengalihan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi. Sebelumnya, kegiatan tersebut ditangani oleh dua bidang sekaligus di bawah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, setelah perubahan nomenklatur, kegiatan ini sepenuhnya ditangani oleh Bidang Mutasi dan Promosi di lingkungan BKPSDM.

Dengan pengkonsolidasian tanggung jawab ini di bawah satu bidang, yaitu Bidang Mutasi dan Promosi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam konteks perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, peran Bidang Mutasi dan Promosi menjadi lebih terfokus dan konsisten dalam pengelolaan sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu.

II. Bidang Pengadaan, Pemberhentian Data Kinerja ASN

Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

 **Anggaran: Sebelumnya Rp 514.821.850,- -> Refocusing menjadi Rp 707.953.600,-**

Sehubungan dengan restrukturisasi nomenklatur dan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu, dilakukan perubahan dalam pengelolaan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelumnya, kegiatan ini ditangani oleh dua bidang. Namun, setelah perubahan nomenklatur, seluruh aspek terkait ASN, pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, ditangani secara terintegrasi oleh Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Data Kinerja ASN di Lingkungan BKPSDM.

Kegiatan ini merupakan inti dalam manajemen sumber daya manusia pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan ASN. Melalui kegiatan ini, BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu berperan dalam mengelola proses pengadaan, pengembangan, dan pemberhentian ASN serta menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait kepegawaian.

Dengan pengkonsolidasian tanggung jawab di bawah satu bidang, yaitu Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Data Kinerja ASN, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan koordinasi dalam proses pengadaan, pemberhentian, serta penyediaan informasi kepegawaian ASN di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam konteks perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, peran bidang ini menjadi lebih terfokus dan kohesif dalam mengelola aspek-aspek vital dalam manajemen kepegawaian.

Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

 **Anggaran: Sebelumnya Rp 347.342.400,- -> Refocusing menjadi Rp 343.340.650,-**

Pengelolaan kinerja aparatur merupakan elemen esensial dalam upaya pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam rangka memastikan peningkatan kualitas kinerja aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu berperan penting dalam melaksanakan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Dengan restrukturisasi nomenklatur dan organisasi, kegiatan ini sekarang dikoordinasikan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pengadaan, Pemberhentian Data Kinerja ASN.

Awalnya, anggaran untuk kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur diestimasikan sekitar 347.342.400,-. Namun, dengan restrukturisasi dan pergeseran prioritas terhadap masing-masing sub kegiatan, anggaran ini mengalami penurunan menjadi 343.340.650,-. Pergeseran anggaran ini didasarkan pada pertimbangan keurgensitas dan dampak dari masing-masing sub kegiatan terhadap peningkatan kualitas kinerja aparatur.

Melalui pengelolaan yang terpadu dalam Bidang Pengadaan, Pemberhentian Data Kinerja ASN, BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dilaksanakan dengan baik, hasilnya diaplikasikan secara efektif dalam pengembangan dan pemberdayaan aparatur, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

III. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN

🚦 **Anggaran: Sebelumnya Rp 77.042.500,- -> Refocusing menjadi Rp 136.653.500,-**

Pengembangan kompetensi ASN merupakan komponen krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah. Dalam upaya tersebut, Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peran sentral dalam merancang dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN. Melalui kegiatan ini, DPSDM bertujuan untuk memastikan bahwa ASN memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu berkontribusi secara optimal dalam pelayanan publik.

Justifikasi Penambahan Anggaran:

Awalnya, anggaran untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN diestimasikan sekitar 77.042.500,-. Namun, dengan penambahan rincian kegiatan terkait ujian dinas dan penyetaraan ijazah, anggaran ini mengalami peningkatan menjadi 136.653.500,-. Penambahan ini diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian dinas yang memerlukan sumber daya seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan administrasi. Sementara itu, penyetaraan ijazah memerlukan biaya tambahan untuk proses administrasi dan verifikasi.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis

🚦 **Anggaran: Tetap Rp 38.797.000,-**

Pengembangan kompetensi teknis aparatur merupakan langkah krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Dalam upaya tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu memainkan peran sentral dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis. Melalui kegiatan ini, BKPSDM berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur agar mereka dapat lebih efektif dan produktif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Justifikasi Penambahan Anggaran:

Pagu anggaran untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis tetap sebesar 38.797.000,- dan tidak mengalami penambahan. Hal ini didasarkan pada analisis kebutuhan yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam perencanaan anggaran ini, faktor-faktor seperti jumlah peserta, metode pelatihan, materi, dan biaya operasional telah dipertimbangkan secara matang.

Dengan menjaga pagu anggaran tetap dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tujuan yang jelas dalam memastikan bahwa aparatur memiliki kompetensi teknis yang relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini. Melalui pengembangan kompetensi teknis yang baik, diharapkan aparatur akan mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kegiatan: Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

🚦 **Anggaran: Sebelumnya Rp 2.502.651.400,- -> Refocusing menjadi Rp 2.236.920.400,-**

Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di sektor publik merupakan prioritas utama dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dan relevan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Justifikasi Penambahan Anggaran:

Awalnya, anggaran untuk kegiatan ini diestimasikan sekitar 2.502.651.400,-. Namun, setelah dilakukan analisis kebutuhan yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terjadi pengurangan sebesar 2.236.920.400,-. Pengurangan ini terutama dilakukan dengan mengurangi dana setoran dan transport peserta diklatpim eselon II yang awalnya dianggarkan untuk 8 orang, menjadi hanya 5 orang yang dapat berangkat. Sementara itu, 3 orang peserta akan ditunda dengan alasan tertentu.

Melalui pengurangan anggaran yang dijalankan secara efisien dan berdasarkan analisis kebutuhan yang cermat, BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu tetap berkomitmen untuk memberikan layanan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan kelembagaan yang berkualitas kepada aparatur. Dengan cara ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian data laporan refocusing program kegiatan ini kami buat. Dengan penuh komitmen dan semangat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil merancang dan melaksanakan refocusing program kegiatan tahun 2023. Proses ini melibatkan transformasi yang signifikan dalam struktur organisasi dan penyesuaian prioritas kegiatan demi mencapai efisiensi, efektivitas, dan dampak yang lebih besar. Hasil refocusing ini adalah cerminan dari dedikasi kami dalam memastikan bahwa sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas menjadi aset utama dalam mewujudkan visi pelayanan publik yang prima.

Keputusan untuk mengintegrasikan tanggung jawab dalam satu bidang memungkinkan kami untuk lebih terfokus dan adaptif dalam mengelola program-program yang menjadi prioritas. Perubahan nomenklatur dan pengalihan tanggung jawab menjadi landasan kuat bagi perubahan yang lebih baik.

Kedamin, 5 April 2023



tte